



Badan Pembinaan Hukum Nasional

Laporan Keuangan Tahunan Satker (Audited)

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal

31 Desember 2020

Jl. Mayjend Soetoyo No. 10 Cililitan

Jakarta Timur 13640

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2021
Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran,



Audy Murfi MZ, SH., MH
NIP. 19630327 198903 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	34
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	48
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	55
F. Pengungkapan Penting Lainnya	58
VI. Lampiran dan Daftar	60



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jl. May. Jend. Sutoyo-Cililitan No.10 Jakarta Timur

Telp. 021-8091908 Fax 021-8002265 website : www.bphn.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran , Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2021

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

NIP. 19620410 198703 1 003

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp17.318.524 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp38.293.829.111 atau mencapai 96,62 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp39.634.524.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp406.749.392.429; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp174.403.190; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp406.539.391.489; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp35.597.750; Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp91.539.854; dan Rp406.657.852.575.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.189.632 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp39.777.212.551 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp39.759.022.919). Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp548.501.207) dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp40.307.524.126).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp407.871.872.538 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp40.307.524.126) dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp131.753.750 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp39.225.257.913 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp406.657.852.575.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020		% thd Angg	31 DESEMBER 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	17.318.524	0,00	72.212.099
JUMLAH PENDAPATAN		-	17.318.524	0,00	72.212.099
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	17.045.164.000	16.680.973.721	97,86	16.822.442.236
Belanja Barang	B.4	17.812.277.000	16.930.622.090	95,05	20.622.752.865
Belanja Modal	B.5	4.777.083.000	4.682.233.300	98,01	538.692.926
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		39.634.524.000	38.293.829.111	96,62	37.983.888.027

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

NERACA

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	174.403.190	185.516.985
Jumlah Aset Lancar		174.403.190	185.516.985
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	356.165.357.000	356.165.357.000
Peralatan dan Mesin	C.15	18.929.282.337	17.998.176.389
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.16	-	-
Gedung dan Bangunan	C.17	59.485.084.562	57.766.459.562
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.18	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.19	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.20	992.050.812	1.546.250.949
Konstruksi dalam pengerjaan	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.22	(29.032.383.222)	(25.684.274.427)
Jumlah Aset Tetap		406.539.391.489	407.791.969.473
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.23	4.184.325.500	3.991.605.500
Aset Lain-Lain	C.24	2.332.664.320	662.708.600
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.25	(6.481.392.070)	(4.635.174.100)
Jumlah Aset Lainnya		35.597.750	19.140.000
JUMLAH ASET		406.749.392.429	407.996.626.458
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.26	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	85.755.996	104.950.910
Pendapatan Diterima di Muka	C.28	5.783.858	19.803.010
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.29	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		91.539.854	124.753.920
JUMLAH KEWAJIBAN		91.539.854	124.753.920
EKUITAS			
Ekuitas	C.30	406.657.852.575	407.871.872.538
JUMLAH EKUITAS		406.657.852.575	407.871.872.538
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		406.749.392.429	407.996.626.458

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	18.189.632	9.538.890
JUMLAH PENDAPATAN		18.189.632	9.538.890
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	16.680.973.721	16.820.259.236
Beban Persediaan	D.3	690.090.998	480.508.747
Beban Barang dan Jasa	D.4	10.668.741.685	18.587.184.721
Beban Pemeliharaan	D.5	2.393.716.096	2.473.978.357
Beban Perjalanan Dinas	D.6	4.107.160.492	6.776.575.153
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	5.236.529.559	6.865.111.723
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		39.777.212.551	52.003.617.937
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(39.759.022.919)	(51.994.079.047)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	13.147.786	39.030.000
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		8.178.581	18.584.569
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		564.146.987	-
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya		5.680.587	5.208.549
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(548.501.207)	52.406.020
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(40.307.524.126)	(51.941.673.027)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(40.307.524.126)	(51.941.673.027)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
EKUITAS AWAL	E.1	407.871.872.538	123.938.732.465
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(40.307.524.126)	(51.941.673.027)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AS	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	(131.753.750)	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.5	-	151.507.580.870
KOREKSI NILAI ASET NO REVALUASI	E.3.6	-	136.561.373.382
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	-	-
JUMLAH		(131.753.750)	288.068.954.252
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	39.225.257.913	47.805.858.848
EKUITAS AKHIR	E.5	406.657.852.575	407.871.872.538

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pembinaan Hukum

Nasional

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kementerian Hukum dan HAM memiliki fungsi strategis dalam tahapan legislasi. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memiliki kewenangan yang cukup besar dalam dua lingkup yakni tahap pralegislati dan pasca legislasi.

Pembinaan Hukum Nasional memiliki fungsi pembentukan hokum sekaligus juga fungsi pelayanan hukum. Fungsi-fungsi tersebut dilakukan melalui serangkaian tugas yang saling berkaitan. Fungsi pembentukan hokum dilakukan melalui perencanaan hokum serta analisa dan evaluasi hukum, sedangkan fungsi pelayanan hokum dilakukan melalui dokumentasi dan informasi hokum serta penyuluhan hukum dan bantuan hukum.

1. Perencanaan Hukum

Perencanaan hukum merupakan kegiatan pembenahan atau pembaruan hukum agar arah pembangunan selaras dengan arah pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pelaksanaan perencanaan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif berupa peraturan perundang-undangan namun juga sistem hukum dalam arti luas yang mencakup pembenahan pada aspek substansi hukum, kelembagaan hukum, budaya hukum dan pelayanan hukum.

Perencanaan hukum dilakukan melalui kegiatan:

a. Penyusunan Perencana Pembangunan Hukum Nasional.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan masukan mengenai konsep dan strategi pembangunan hukum nasional memperhatikan/mengakomodasi perkembangan hukum nasional, perkembangan hukum internasional dan perkembangan kebutuhan hukum di daerah.

b. Penyusunan Program Legislasi Nasional usulan Pemerintah, Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari perencanaan hukum pada aspek substansi hukum. Kegiatan ini adalah pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemenkumham memiliki kedudukan sebagai koordinator penyusunan perencanaan pembentukan UU (Prolegnas) usulan Pemerintah, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Program Pembentukan Peraturan Presiden.

- c. Monitoring dan Evaluasi penyusunan Program Legislasi Nasional usul Pemerintah, Program Pembentukan Pemerintah dan Peraturan Presiden.
- d. Fasilitas Program Pembentukan Peraturan daerah (Perencanaan Pembangunan Hukum di Daerah)

Dalam rangka pembinaan sistem hukum di daerah, Kemenkumham melakukan fasilitas berupa penyediaan pedoman penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah serta asistensi dan evaluasi dalam rangka konsultasi permasalahan hukum dan perencanaan pembentukan hukum di daerah yang selaras dengan pembangunan hukum di Pusat.

- e. Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang.

Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik merupakan bagian dari perencanaan peraturan perundang-undangan agar menghasilkan Undang-Undang yang berkualitas. Tugas ini adalah pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 dan Perpes No.87 Tahun 2014. Penyusunan Naskah Akademik dilaksanakan oleh BPHN terutama Naskah Akademik yang berasal dari RUU Prakarsa Kementerian Hukum dan HAM sedangkan tugas penyelarasan Naskah Akademik dilakukan oleh BPHN untuk seluruh Naskah Akademik yang di susun oleh kementerian/LPNK yang RUU-nya akan dimasukkan kedalam prolegnas prioritas.

2. Analisa dan Evaluasi Hukum:

Bentuk kegiatan analisa dan evaluasi hukum mencakup dua kegiatan yaitu kegiatan 1) analisa dan evaluasi peraturan dan perundang-undangan kolonial dan 2) analisa dan evaluasi hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

(peraturan perundang-undangan yang dibuat sejak Indonesia merdeka sampai sekarang).

Kegiatan analisa dan peraturan kolonial ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui berapa jumlah peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial yang masih berlaku dan berapa peraturan perundang-undangan kolonial yang sudah di ganti dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan hokum nasional. Kegiatan ini untuk menentukan kasus status dari peraturan perundang-undangan kolonial yang belum dicabut hingga kini untuk disesuaikan dengan cita hukum nasional .

Analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, berdasarkan data inventarisasi Undang-Undang tahun 1945–2012, terdapat 1245 UU yang secara *de jure* masih berlaku tetapi secara *defacto* daya laku UU tersebut banyak yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Maka diperlukan pembenahan peraturan perundang-undangan melalui analisa dan evaluasi secara berkala, untuk menilai daya guna dan daya laku peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan melalui kegiatan:

- Penyediaan pelayanan perpustakaan
- Pelayanan otomatis dan dokumentasi hukum

A. Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia :

”Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum”

B. Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diwujudkan melalui 4 misi yaitu :

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional;
2. Mewujudkan pelayanan hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Mewujudkan penegakkan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi sosial;
4. Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pembinaan Hukum Nasional menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam penyusunan dan

penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan

dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan

minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

AsetLainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak

terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar,

Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja sebagai berikut:

Uraian	31 DESEMBER 2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Pengelolaan BMN	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	15.680.453.000	17.045.164.000
Belanja Barang	20.379.718.000	17.812.277.000
Belanja Modal	6.661.000.000	4.777.083.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	42.721.171.000	39.634.524.000

Sedangkan apabila dilihat dari Kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional maka perubahannya adalah sebagai berikut:

KEGIATAN	2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Publikasi, Pengolahan Data Hukum dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	1.749.425.000	1.135.957.000
Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan Penelitian, Serta Pertemuan Ilmiah dalam Rangka Pengembangan Sistem	2.108.130.000	1.530.820.000
Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional	2.834.150.000	1.822.367.000
Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi Penyusunan Naskah Akademik	1.702.509.000	1.545.443.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	34.326.957.000	33.599.937.000
Total Belanja	42.721.171.000	39.634.524.000

Pada tahun 2020 ini Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 senilai Rp1.033.679.000 Rincian realokasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Akun	URAIAN	Pagu	
		Semula	Menjadi
521131	Belanja Barang Operasional - Penangan Pandemi COVID-19	0	339.727.000
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	181.363.000
521841	Belanja Barang Persediaan - Penangan Pandemi COVID-19	0	197.225.000
522192	Belanja Jasa - Penangan Pandemi COVID-19	0	191.664.000
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penangan Pandemi COVID-19	0	113.700.000
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Penanganan Pandemi COVID-19	0	10.000.000
	Jumlah Belanja	0	1.033.679.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.318.524 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Realisasi Pendapatan TA 2020 mengalami penurunan sebesar 76,02% persen dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, serta tidak adanya pendapatan sewa kantin karena telah dibayar dimuka selama 2 tahun. Pendapatan TA. 2020 berupa pendapatan dari lelang sebesar Rp2.370.009 sesuai risalah lelang nomor : 88/28/2020 tanggal 2 April 2020 dan Rp10.777.777 sesuai risalah lelang nomor 90/28/2020 tanggal 3 April 2020 dan pendapatan lain-lain berupa pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang lalu (rincian terlampir pada tabel).

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Pengelolaan BMN	-	13.147.786	-
Pendapatan Denda	-	4.170.480	-
Pendapatan Lain-lain	-	258	-
Jumlah	-	17.318.524	-

Realisasi Pendapatan sebesar Rp17.318.524 berupa :

- Lelang 1 Paket barang Inventaris sebesar Rp2.370.009 sesuai Risalah lelang No. 88/28/2020 tanggal 2 April 2020 yang terdiri dari : 13 unit Lemari besi/metal, 1 unit Filling kabinet besi, 3 unit Papan visual/papan nama, 8 unit White board, 1 unit Panel pameran, 1 unit White board elektronik, 18 unit Meja kerja kayu, 41 unit Kursi besi metal, 4 unit Sice, 27 unit Meja rapat, 23 unit Meja komputer, 3 unit Meja telepon, 2 unit Kursi fiber glas/plastik, 8 unit Jam elektronik, 41 unit Mic conference, 2 unit Stabilisator, 5 unit lambang garuda pancasila, 2 unit Dispenser, 3 unit pesawat telepon, 1 unit Facsimile, 1 unit Nasal Speculum Set, 1 unit Refflex Hammer.
- Lelang 1 Paket barang Inventaris sebesar Rp10.777.777 sesuai Risalah lelang No. 90/28/2020 tanggal 3 April

2020 yang terdiri dari : 2.604 buah buku Monografi.

- Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp258 dari potongan SPM.
- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa pembayaran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Konstruksi Fisik Renovasi Kantor BPHN untuk 3 hari (Batas waktu penyelesaian pekerjaan pada 24 Oktober 2020, penyedia baru menyelesaikan pekerjaan di 27 Oktober 2020), sehingga penyedia dikenakan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan, yaitu sebesar 3 hari dikalikan Rp1.390.160 atau sebesar Rp4.170.480 dari potongan SPM.

**Perbandingan Realisasi Pendapatan
Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2020	REALISASI 31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Dari Pengelolaan BMN	13.147.786	67.030.000	-80,39
Pendapapatan luran dan Denda	4.170.480	1.341.900	210,79
Pendapatan Lain-lain	258	3.840.199	(99,99)
Jumlah	17.318.524	72.212.099	-76,02

B.2 Belanja

*Realisasi Belanja
Negara
Rp38.293.829.111*

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp38.293.829.111 atau 96,62% dari anggaran belanja sebesar Rp39.634.524.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2020

Uraian	31 Desember 2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	17.045.164.000	16.680.973.721	97,86
Belanja Barang	17.812.277.000	16.930.622.090	95,05
Belanja Modal	4.777.083.000	4.682.233.300	98,01
Total Belanja Kotor	39.634.524.000	38.293.829.111	96,62
Pengembalian		-	-
Jumlah	39.634.524.000	38.293.829.111	96,62

Perbandingan realisasi belanja mengalami kenaikan sebesar 0,82% dibandingkan realisasi belanja pada periode

sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja

Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	16.680.973.721	16.822.442.236	(0,84)
Belanja Barang	16.930.622.090	20.622.752.865	(17,90)
Belanja Modal	4.682.233.300	538.692.926	769,18
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	38.293.829.111	37.983.888.027	0,82

Belanja Pegawai
Rp.16.680.973.721

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.16.680.973.721 dan Rp.16.822.442.236. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Terdapat Pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp6.445.457 yang terdiri dari :

- Pengembalian Pembulatan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp457 melalui potongan SPM.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural Eselon IV atas cuti besar bulan Januari 2020 a.n. Iwan Rustiadi sebesar Rp540.000 sesuai NTPN 0DC260N9UUVAE0IK tanggal 19 Februari 2020.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Jabatan Struktural Eselon IV atas MPP bulan April s.d Juni 2020 a.n Heru Baskoro sebesar Rp1.620.000 sesuai NTPN 785210N9UVAREIJ2 tanggal 08 Juni 2020.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional Pustakawan Pertama atas cuti besar bulan Maret 2020 a.n Gustina sebesar Rp520.000 sesuai NTPN A20D21JNEPT7RIEN tanggal 08 Juni 2020.

- Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp555.000 melalui potongan SPM.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp740.000 melalui potongan SPM.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional Perancang Pertama atas cuti besar bulan Juli-Agustus 2020 a.n Amir Muzzaki sebesar Rp.650.000 sesuai NTPN 5C9AD48VU9TFEEEQ tanggal 09 September 2020.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp560.000 melalui potongan SPM.
- Pengembalian Tunjangan Jabatan Struktural Eselon III atas cuti besar Bulan Oktober 2020 a.n Artiningsih sebesar Rp1.260.000 sesuai NTPN 3FF4061QTV5AMVG6 tanggal 12 Oktober 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2020	REALISASI 31 DESEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	16.398.182.178	16.454.133.929	(0,34)
Belanja Lembur	289.237.000	382.825.000	(24,45)
Jumlah Belanja Kotor	16.687.419.178	16.836.958.929	(0,89)
Pengembalian Belanja Pegawai	(6.445.457)	(14.516.693)	(55,60)
Jumlah Belanja	16.680.973.721	16.822.442.236	(0,84)

Belanja Barang
Rp16.930.622.090

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp16.930.622.090 dan Rp20.622.752.865. Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 17,09 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019. Pengembalian Belanja Barang untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp26.665.766 yang terdiri dari :

- Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa kegiatan Monitoring dan Evaluasi JDIHN sesuai PerPres No. 33 Tahun 2012 tanggal 18 s.d 20 Maret 2020 Jakarta-Kupang PP a.n M. Fahri Rudiyanto sebesar

Rp2.018.000 sesuai NTPN AA5EC55DE47HO8KT tanggal 30 Juni 2020.

- Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa kegiatan Monitoring dan Evaluasi JDIHN sesuai PerPres No. 33 Tahun 2012 tanggal 18 s.d 20 Maret 2020 Jakarta-Medan PP a.n Aji Bagus Pramukti sebesar Rp2.086.000 sesuai NTPN 71AF348VU9L5BA5A tanggal 30 Juni 2020.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa kegiatan Monitoring dan Evaluasi JDIHN sesuai PerPres No. 33 Tahun 2012 tanggal 18 s.d 20 Maret 2020 Jakarta-Padang PP a.n Indar Saleh sebesar Rp2.032.000 sesuai NTPN 2438E1JNEPU0481D tanggal 30 Juni 2020.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota kegiatan FGD di daerah Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN sebesar Rp225.000 sesuai NTPN 161FE2G4UKPAUKIM tanggal 30 September 2020.
- Pengembalian Belanja Jasa Profesi berupa honor narasumber kegiatan FGD pengembangan aplikasi dan basis data di Bekasi sebesar Rp.340.000 sesuai NTPN CD6E46U8DPL82R31 tanggal 30 September 2020.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa atas selisih perjalanan dinas kegiatan peningkatan kapasitas perpustakaan daerah sebesar Rp152.000 sesuai NTPN 5698E61QTV2RLOCO tanggal 30 September 2020.
- Pengembalian Perjalanan Biasa berupa Pengembalian uang harian dan transport perjadiin pada kegiatan penyusunan proses bisnis BPHN di Bogor sebesar Rp1.900.000 sesuai NTPN 4B16E48VUA0P5DRK tanggal 20 Oktober 2020.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa berupa pengembalian pada kegiatan penyusunan RKA-KL BPHN Tahun 2021 ke Kanwil Kemenkumham Sumbar sebesar Rp663.700 sesuai NTPN E546D6U8DPR0L6KF tanggal 24 November 2020.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa berupa Pengembalian pada kegiatan penyusunan RKA-KL BPHN tahun 2021 ke Kanwil Kemenkumham Jabar sebesar Rp140.000 sesuai NTPN 5EA918N3DEVPP4TR tanggal 24 November 2020.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa berupa

Pengembalian pada kegiatan penyusunan RKA-KL BPHN tahun 2021 ke Kanwil Kemenkumham Jabar sebesar Rp280.000 sesuai NTPN BB1EF8N3DEVPF439 tanggal 24 November 2020.

- Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa berupa Pengembalian pada kegiatan monev kegiatan BPHN ke Kanwil Kemenkumham Sumbar sebesar Rp3.366.400 sesuai NTPN BBC262G4UKV2K6CQ tanggal 24 November 2020.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi Covid-19 atas kelebihan pembayaran transport pegawai yang melaksanakan tugas *Wok From Office* pada Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional Sebesar Rp500.000 sesuai NTPN B2F1C55DE4P0CUOP tanggal 16 Desember 2020, Berdasarkan temuan hasil audit Inspektorat Jenderal atas Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 pada tanggal 1 s.d 9 Desember 2020.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa atas pengembalian uang harian dan uang transport kegiatan konsinyasi rencana strategis BPHN tahun 2020-2024 sebesar Rp1.900.000 sesuai NTPN DD75C55DE4P2GPJV tanggal 18 Desember 2020.
- Pengembalian Belanja Jasa Profesi atas pengembalian sisa honorarium kegiatan konsinyering penyempurnaan naskah akademik RUU tentang Badan Usaha sebesar Rp900.000 sesuai NTPN 223D01JNEQFGSTN3 tanggal 18 Desember 2020.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas pengembalian biaya Rapid Test kegiatan bidang penyusunan naskah akademik sebesar Rp850.000 sesuai NTPN E6B792G4UL1T9SEQ tanggal 18 Desember 2020.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota atas pengembalian uang harian Kapusren dan Bapak Iwan pada kegiatan bidang penyusunan naskah akademik sebesar Rp300.000,- sesuai NTPN FB4B67QLTKG7NTGO tanggal 18 Desember 2020.
- Pengembalian Belanja Jasa Profesi berupa honor narasumber a.n Prof Yasonna Hamonangan Laoly pada kegiatan Rapat Pembahasan Tahunan Perencanaan

Peraturan Pemerintah dan Perpres Tahun 2021 sebesar Rp.3.570.000 sesuai NTPN 680186U8DPTRAS6H tanggal 18 Desember 2020.

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota berupa Pengembalian sisa Biaya Paket Meeting Fullboard pada Kegiatan Bidang Renleg di Bogor sebesar Rp428.000,- sesuai NTPN 2A32E55DE4P2GTRT tanggal 18 Desember 2020.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa berupa Pengembalian sisa uang tiket pada kegiatan diskusi publik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang tentang Hukum Perdata Internasional di Bali sebesar Rp5.014.666,- sesuai NTPN 23C6955DE4P7KGG1 tanggal 23 Desember 2020.

Perbandingan Belanja Barang

Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2020	REALISASI 31 DESEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2.985.533.861	2.670.320.108	11,80
Belanja Barang Non Operasional	3.416.511.581	4.494.726.489	(23,99)
Belanja Barang Persediaan	725.708.967	291.557.710	148,91
Belanja Jasa	3.356.030.593	3.941.430.813	(14,85)
Belanja Pemeliharaan	2.344.486.596	2.458.895.092	(4,65)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.129.016.258	6.721.514.305	(38,57)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	63.009.848	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	16.957.287.856	20.641.454.365	(17,85)
Pengembalian Belanja	(26.665.766)	(18.701.500)	42,59
Jumlah Belanja	16.930.622.090	20.622.752.865	(17,90)

Badan Pembinaan Hukum Nasional mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp1.023.679.000. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp990.246.631 atau sebesar 96,73 persen dari yang dianggarkan, dengan rincian sebagai berikut :

Akun	URAIAN	Pagu	Realisasi	Penyerapan (%)
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	339.727.000	335.337.676	98,71%
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	181.363.000	170.716.230	94,13%
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	197.225.000	197.193.725	99,98%
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	191.664.000	174.299.000	90,94%
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	113.700.000	112.700.000	99,12%
	Jumlah Belanja	1.023.679.000	990.246.631	96,73%

Belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 adalah berupa pembelian lisensi aplikasi zoom, penggantian transport dan pulsa bagi pegawai, honor narasumber dan moderator kegiatan, biaya Swab test pegawai, Desinfeksi Kantor BPHN, pembelian thermometer, masker, faceshield, handsanitizer, APD, desinfektan galon, Alat Uji Rapid Test, Obat-obatan dan Vitamin untuk Pegawai (rincian terlampir).

**Perbandingan Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19
Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2020	REALISASI 31 DESEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	335.337.676	0	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	170.716.230	0	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	197.193.725	0	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	174.299.000	0	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	113.200.000	0	-
Jumlah Belanja Kotor	990.746.631	0	-
Pengembalian Belanja	(500.000)	0	-
Jumlah Belanja	990.246.631	0	-

Belanja Modal
Rp4.682.233.300

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.682.233.300 dan Rp538.692.926. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 769,18 persen dibandingkan periode 31 Desember 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2020	REALISASI 31 DESEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.760.336.450	244.380.927	1029,52
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.718.625.000	0	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	203.271.850	294.311.999	(30,93)
Jumlah Belanja Kotor	4.682.233.300	538.692.926	769,18
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	4.682.233.300	538.692.926	769,18

Badan Pembinaan Hukum Nasional mengalokasikan belanja modal untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp10.000.000. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp9.996.250 atau sebesar 99,96 persen dari yang dianggarkan, dengan rincian sebagai berikut :

Akun	URAIAN	Pagu	Realisasi	Penyerapan (%)
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	10.000.000	9.996.250	99,96%
	Jumlah Belanja	10.000.000	9.996.250	99,96%

Perbandingan Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19

Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2020	REALISASI 31 DESEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	9.996.250	0	-
Jumlah Belanja Kotor	9.996.250	0	-
Pengembalian Belanja	-	0	-
Jumlah Belanja	9.996.250	0	-

Realisasi Belanja Modal untuk penanganan pandemi COVID-19 adalah berupa pengadaan *wastafel portable*.

Belanja Modal Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada anggaran atau pun realisasi belanja modal Tanah di Tahun Anggaran 2020.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.760.336.450,- dan Rp244.380.927,- realisasi belanja modal peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar 1.029,52 persen. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin pada tahun anggaran 2020.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2020	REALISASI 31 DESEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.760.336.450	244.380.927	1029,52
Jumlah Belanja Kotor	2.760.336.450	244.380.927	1029,52
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	2.760.336.450	244.380.927	1029,52

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.760.336.450 adalah berupa pembelian:

- 1 Buah Lemari Kayu sebesar Rp15.500.000
- 6 Alat Penghancur Kertas sebesar Rp29.706.000
- 4 Buah Mesin Absensi sebesar Rp43.450.000
- 2 Buah LCD Projector/Infocus sebesar Rp34.830.000
- 2 Buah Bel sebesar Rp14.850.000
- 1 Unit Wastafel Portabel sebesar Rp9.996.250
- 119 Kursi Besi/Metal sebesar Rp157.425.000
- 1 Buah Lemari Es sebesar Rp3.186.100
- 10 Buah Televisi sebesar Rp58.490.000
- 2 Buah Loudspeaker sebesar Rp32.640.000
- 1 Buah Camera Video sebesar Rp17.970.000
- 2 Buah tangga alumunium sebesar Rp7.654.105
- 1 Buah Dispenser sebesar Rp4.848.000
- 2 Bracket Standing Peralatan sebesar Rp6.472.600
- 1 Buah Tripod Camera sebesar Rp2.784.700
- 1 Buah Lensa Kamera sebesar Rp22.550.000
- 2 Buah Kamera Digital sebesar Rp40.040.000
- 15 Buah Handy Talky (HT) sebesar Rp44.910.000
- 38 Buah P.C Unit sebesar Rp378.480.000
- 6 Buah Note Book sebesar Rp188.400.000
- 70 Buah Net Book sebesar Rp862.750.000
- 2 Buah Tablet PC sebesar Rp53.400.000
- 1 Personal Komputer lainnya sebesar Rp31.397.000

- 8 Buah Scanner (Peralatan Mini Komputer) sebesar Rp65.850.000
- 2 Buah Keyboard (Peralatan Mini Komputer) sebesar Rp13.198.000
- 40 Buah Printer (Peralatan Personal Komputer) sebesar Rp139.520.000
- 1 Buah Sepeda Olahraga sebesar Rp22.977.620

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp1.718.625.000*

Realisasi Belanja Modal Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.718.625.000 dan Rp0.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2020	REALISASI 31 DESEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.718.625.000	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.718.625.000	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	1.718.625.000	0	0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.718.625.000 terdiri dari pekerjaan renovasi koridor aula kantor BPHN sebesar Rp188.600.000 dan Rp1.530.025.000 berasal dari pengembangan melalui KDP (Renovasi lantai 1 gedung induk BPHN. Berupa KDP pada saat masih pengerjaan, kemudian direklas menjadi aset pada saat pekerjaan renovasi selesai sehingga menambah nilai Gedung dan Bangunan)

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp0*

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Modal
Lainnya
Rp203.271.850*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp203.271.850 dan Rp294.311.999. Penambahan realisasi Belanja Modal Lainnya adalah berupa pengadaan Buku Hukum sebesar Rp9.946.850 dan Pengembangan Aplikasi Akses Penyuluhan dan Bantuan Hukum (Sidbankum) sebesar Rp193.325.000.

URAIAN JENIS BELANJA	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	Naik (Turun) %
Belanja Buku dan Koleksi Perpustakaan (monografi)	0	0	#DIV/0!
Belanja aplikasi JDHN	0	0	#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai Aset Tak Berwujud Lainnya	193.325.000	244.610.000	-20,97
Belanja Modal Lainnya	9.946.850	49.701.999	-79,99
Jumlah Belanja Kotor	203.271.850	294.311.999	-30,93
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	203.271.850	294.311.999	-30,93

C. PENJELASAN ATAS POS – POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Bank BNI Cab. Jatinegara Unit BKN (norek 0029334497)	Rp -	Rp -
Uang Tunai	Rp -	Rp -
Uang Muka	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp -	Rp -

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang PNB
Rp0*

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar TPA
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
(Rp0)*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp0) dan (Rp0). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja Dibayar di
Muka Rp0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan

Rp.174.403.190

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Masing-masing adalah sebesar Rp174.403.190 dan Rp185.516.985. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Jenis	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Barang Konsumsi	174.403.190	185.516.985
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	174.403.190	185.516.985

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Berita Acara Stock Opname Persediaan disajikan pada lampiran.

Tagihan TP/TGR

Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
(Rp0)

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah
Rp356.165.357.00
0

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pembinaan Hukum Nasional per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp356.165.357.000 dan Rp356.165.357.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	356.165.357.000
Mutasi tambah:	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2020	356.165.357.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Periode 31 Desember 2020

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	11.348 m2	Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur	356.165.357.000
Jumlah			356.165.357.000

- Saldo aset tetap berupa Tanah seluas 11.348 m2 terletak di Jalan Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur sesuai Sertifikat Nomor 6938773 Tahun 1986 dan Nomor 09040402400106 tanggal 06 Desember 2019.

*Peralatan dan
Mesin
Rp18.929.282.337*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp18.929.282.337 dan Rp17.998.176.389. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	17.998.176.389
Mutasi tambah:	
Pembelian	2.771.877.450
Transfer Masuk	4.057.218
Koreksi	605.000
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(1.845.433.720)
Saldo per 31 Desember 2020	18.929.282.337
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(15.511.399.008)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	3.417.883.329

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Pembelian sebesar Rp2.771.877.450 berupa:
 - 1 Buah Lemari Kayu sebesar Rp15.500.000
 - 6 Alat Penghancur Kertas sebesar Rp29.706.000
 - 4 Buah Mesin Absensi sebesar Rp43.450.000
 - 2 Buah LCD Projector/Infocus sebesar Rp34.830.000
 - 2 Buah Bel sebesar Rp14.850.000
 - 1 Unit Wastafel Portabel sebesar Rp9.996.250
 - 119 Kursi Besi/Metal sebesar Rp157.425.000
 - 1 Buah Lemari Es sebesar Rp3.186.100
 - 10 Buah Televisi sebesar Rp58.490.000
 - 2 Buah Loudspeaker sebesar Rp32.640.000
 - 1 Buah Camera Video sebesar Rp17.970.000
 - 2 Buah tangga alumunium sebesar Rp7.654.105

- 1 Buah Dispenser sebesar Rp4.848.000
- 2 Bracket Standing Peralatan sebesar Rp6.472.600
- 1 Buah Tripod Camera sebesar Rp2.784.700
- 1 Buah Lensa Kamera sebesar Rp22.550.000
- 2 Buah Kamera Digital sebesar Rp40.040.000
- 15 Buah Handy Talky (HT) sebesar Rp44.910.000
- 2 Buah Alat Kedokteran Umum (Clinical Thermometer) sebesar Rp11.541.000
- 38 Buah P.C Unit sebesar Rp378.480.000
- 6 Buah Note Book sebesar Rp188.400.000
- 70 Buah Net Book sebesar Rp862.750.000
- 2 Buah Tablet PC sebesar Rp53.400.000
- 1 Personal Komputer lainnya sebesar Rp31.397.000
- 8 Buah Scanner (Peralatan Mini Komputer) sebesar Rp65.850.000
- 2 Buah Keyboard (Peralatan Mini Komputer) sebesar Rp13.198.000
- 40 Buah Printer (Peralatan Personal Komputer) sebesar Rp139.520.000
- 1 Buah Sepeda Olahraga sebesar Rp22.977.620

b. Transfer masuk sebesar Rp4.057.218 berupa:

- 1 Buah Tablet PC sebesar Rp4.057.218 dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM RI

c. Koreksi dari Aset Tak Berwujud berupa *software* system operasi komputer senilai Rp605.000. *Software* tersebut seharusnya tidak tercatat sendiri sebagai Aset Tak Berwujud karena seharusnya dikapitalisasi pada peralatan mesin yang terpasang *software* terkait (Sebagai tindak lanjut atas temuan Audit BPK pada LK Kementerian TA 2020 *Unaudited*)

Mutasi transaksi pengurangan transaksi peralatan dan mesin berupa :

Penghentian Aset dari penggunaan sebesar Rp.1.845.433.720 berupa:

- 1 Unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah) sebesar Rp259.578.000
- 24 Buah LCD Projector/Infocus sebesar Rp283.718.942
- 650 Buah Kursi Besi/Metal sebesar Rp123.109.000
- 13 Buah Sice sebesar Rp42.235.000

- 119 Buah AC Split Sebesar Rp1.002.588.998
- 19 Buah Televisi sebesar Rp112.278.580
- 8 Buah Handy Talky (HT) sebesar Rp21.925.200

*Peralatan dan
Mesin Belum
Diregister
Rp0*

C.16 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp0 dan Rp0.

*Gedung dan
Bangunan
Rp59.485.084.562*

C.17 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp59.485.084.562 dan Rp57.766.459.562. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	57.766.459.562
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	188.600.000
Pengembangan Melalui KDP	1.530.025.000
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai	-
Saldo per 31 Desember 2020	59.485.084.562
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(13.520.984.214)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	45.964.100.348

- Nilai Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2020 bertambah sebesar Rp188.600.000 berasal dari pekerjaan renovasi koridor aula kantor BPHN dan sebesar Rp1.530.025.000 berasal dari pengembangan melalui KDP (Renovasi lantai 1 gedung induk BPHN. Berupa KDP pada saat masih pengerjaan, kemudian direklas menjadi aset pada saat pekerjaan renovasi selesai sehingga menambah nilai Gedung dan Bangunan).

*Gedung dan
Bangunan Belum
Diregister
0*

C.18 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar 0 dan Rp0.

Jalan, Jaringan

dan Irigasi Rp0

C.19 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	-
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Saldo per 31 Desember 2020	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	-

Aset Tetap

Lainnya

Rp992.050.812

C.20 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp992.050.812 dan Rp1.546.250.949. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	1.546.250.949
Mutasi tambah:	
Pembelian	9.946.850
Mutasi kurang:	
Penghapusan	-564.146.987
Saldo per 31 Desember 2020	992.050.812
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	0
Nilai Buku per 31 Desember 2020	992.050.812

Mutasi tambah :

- Aset Tetap Lainnya pada 31 Desember 2020 bertambah sebesar Rp9.946.850 berasal dari pembelian monografi.

Mutasi kurang :

- Aset Tetap Lainnya pada 31 Desember 2020 berkurang sebesar Rp564.146.987 berasal dari penghapusan 20.603 buah monografi.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0

C.21 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp29.032.383.222)

C.22 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing (Rp29.032.383.222) dan (Rp25.684.274.427). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Periode 31 Desember 2020

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	18.929.282.337	15.511.399.008	3.417.883.329
2	Gedung dan Bangunan	59.485.084.562	13.520.984.214	45.964.100.348
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	992.050.812	0	992.050.812
		79.406.417.711	29.032.383.222	50.374.034.489

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak
Berwujud
Rp4.184.325.500

C.23 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp4.184.325.500 dan Rp3.991.605.500 Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pembinaan Hukum Nasional berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	3.991.605.500
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Hibah	-
Reklasifikasi Masuk	-
Pengembangan Nilai Aset	193.325.000
Mutasi kurang:	-
Koreksi	(605.000)
Saldo per 31 Desember 2020	4.184.325.500
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2020	(4.157.421.750)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	26.903.750

Mutasi Tambah:

Aset Tak Berwujud pada 31 Desember 2020 bertambah sebesar Rp193.325.000 berasal dari pengembangan nilai aset berupa Aplikasi Akses Penyuluhan dan Bantuan Hukum (Sidbankum)

Mutasi Kurang :

Koreksi berupa software system operasi komputer senilai Rp605.000. Software tersebut seharusnya tidak tercatat sendiri sebagai Aset Tak Berwujud karena seharusnya dikapitalisasi pada peralatan mesin yang terpasang software terkait (Sebagai tindak lanjut atas temuan Audit BPK pada LK Kementerian TA 2020 Unaudited).

Telah dilakukan reklasifikasi atas Aset Tak Berwujud berupa *software computer* dikarenakan pengelompokkan Aset Tak Berwujud tersebut tidak sesuai dengan kodefikasi Aset Tak Berwujud yang seharusnya (Sebagai tindak lanjut atas temuan Audit BPK pada LK Kementerian TA 2020 *Unaudited*).

Rincian Aset Tak berwujud periode 31 Desember 2020

Uraian	Nilai Perolehan
Software :	
- Software Komputer	25.300.000
- Aplikasi Integrasi Website BPHN	382.297.500
- Website BPHN	2.058.528.000
- Aplikasi Akses Penyuluhan dan Bantuan Hukum	1.483.830.000
- Aplikasi Absensi Berbasis Web	19.140.000
- Aplikasi JDIHN	215.230.000
Aset tak berwujud lainnya	0
Jumlah	4.184.325.500

C.24 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp2.332.664.320 dan Rp662.708.600. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	662.708.600
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	1.845.433.720
Mutasi kurang:	
Penghapusan BMN yang dihentikan	(175.478.000)
Saldo per 31 Desember 2020	2.332.664.320
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2020	(2.323.970.320)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	8.694.000

- a. Mutasi Tambah Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp1.845.433.720 berupa :
- 1 Unit Mini Bus sebesar Rp259.578.000
 - 24 Buah LCD Projector/Infocus sebesar 283.718.942
 - 650 Buah Kursi Besi/Metal sebesar Rp123.109.000
 - 13 Buah Sice sebesar Rp42.235.000
 - 119 Buah AC Split sebesar Rp1.002.588.998
 - 19 Buah Televisi sebesar Rp112.278.580, 8 Buah Handy Talkie (HT) sebesar Rp21.925.200.
- b. Mutasi Kurang (Penghapusan BMN yang dihentikan) sebesar Rp175.478.000 berupa :
- 13 Buah Lemari Besi/Metal sebesar Rp5.463.000
 - 1 Buah Filling Kabinet Besi sebesar Rp522.000
 - 3 Buah Papan Visual/Papan Nama sebesar Rp299.000
 - 8 Buah White Board sebesar Rp1.428.000
 - 1 Buah Panel Pameran sebesar Rp946.000
 - 1 Buah White Board Elektronik sebesar Rp2.149.000
 - 18 Buah Meja Kerja Kayu sebesar Rp4.003.000
 - 41 Buah Kursi Besi/Metal sebesar Rp6.822.000
 - 4 Buah Sice sebesar Rp2.164.000
 - 27 Buah Meja Rapat sebesar Rp4.395.000
 - 20 Buah Meja Komputer sebesar Rp3.928.000
 - 3 Buah Meja Telepon sebesar Rp316.000
 - 2 Buah Kursi Fiber Glas/Plastik sebesar Rp1.089.000

- 8 Buah Jam Elektronik sebesar Rp 810.000
- 41 Buah Mic Conference sebesar Rp137.193.000
- 5 Buah Lambang Garuda Pancasila sebesar Rp480.000
- 2 Buah Dispenser sebesar Rp449.000
- 3 Buah Pesawat Telepon sebesar Rp657.000
- 1 Buah Faximile sebesar Rp2.354.000
- 1 Buah Nasal Speculum Set sebesar Rp8.000
- 1 Buah Reflect Hammer sebesar Rp3.000

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp6.481.392.070)*

C.25 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing (Rp6.481.392.070) dan (Rp4.635.174.100). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Software	4.184.325.500	(4.157.421.750)	26.903.750
Jumlah	4.184.325.500	(4.157.421.750)	26.903.750
Aset Lain-lain	2.332.664.320	(2.323.970.320)	8.694.000
Jumlah	6.516.989.820	(6.481.392.070)	35.597.750

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

C.26 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp85.755.996

C.27 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp85.755.996 dan Rp104.950.910. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Di Tahun Anggaran 2020 masih terdapat utang kepada pihak ketiga yang mana utang tersebut adalah utang Tahun Anggaran berjalan sesuai Surat Pernyataan Hutang (SPH) terlampir.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

NO	Jumlah	Keterangan
1	84.463.389	Utang Tagihan Listrik Desember 2020
2	1.292.607	Utang Tagihan Telepon Desember 2020
Jumlah Total	85.755.996	

Pendapatan Diterima di Muka Rp5.783.858

C.28 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.783.858 dan Rp19.803.010. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Pendapatan Sewa Kantin	5.783.858	Pendapatan sewa kantin terhitung dari 30 Juni 2019 s.d 31 Mei 2021
Jumlah	5.783.858	

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.29 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, tidak terdapat beban yang masih harus dibayar pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Ekuitas

Rp406.657.852.57

5

C.30 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp406.657.852.575 dan Rp407.871.872.538. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB

Rp18.189.632

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp18.189.632 dan Rp9.538.890. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

Periode 31 Desember 2020 dan 30 Desember 2019

URAIAN	31-Des-20	31-Des-19	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	14.019.152	8.196.990	71,03
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.170.480	1.341.900	210,79
Jumlah	18.189.632	9.538.890	90,69

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berasal dari sewa kantin pada kantor BPHN pada periode berjalan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp14.1019.152 dan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa pembayaran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Konstruksi Fisik Renovasi Kantor BPHN untuk 3 hari (Batas waktu penyelesaian pekerjaan pada 24 Oktober 2020, penyedia baru menyelesaikan pekerjaan di 27 Oktober 2020), sehingga penyedia dikenakan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan, yaitu sebesar 3 hari dikalikan Rp1.390.160 atau sebesar Rp4.170.480.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp16.680.973.721

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp16.680.973.721 dan Rp16.820.259.236. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2020 dan 2019

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	11.025.362.600	11.030.083.880	(0,04)
Beban Pembulatan Gaji PNS	176.989	163.953	7,95
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	727.818.880	739.074.400	(1,52)
Beban Tunj Anak PNS	193.307.714	197.578.804	(2,16)
Beban Tunj. Struktural PNS	912.030.000	926.560.000	(1,57)
Beban Tunj. Fungsional PNS	856.340.000	899.510.000	(4,80)
Beban Tunj. PPh PNS	75.209.378	84.091.759	(10,56)
Beban Tunj. Beras PNS	492.311.160	502.015.440	(1,93)
Beban Uang Makan PNS	1.873.270.000	1.807.966.000	3,61
Beban Tunjangan Umum PNS	235.910.000	250.390.000	(5,78)
Beban Uang Lembur	289.237.000	382.825.000	(24,45)
Jumlah	16.680.973.721	16.820.259.236	(0,83)

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp690.090.998

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp690.090.998 dan Rp480.508.747. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	690.090.998	445.436.994	54,92
Beban Persediaan Bahan Baku	-	2.618.000	(100,00)
Beban Persediaan Lainnya	-	32.453.753	(100,00)
Jumlah	690.090.998	480.508.747	43,62

*Beban Barang dan
Jasa
Rp10.668.741.685*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp10.668.741.685 dan Rp18.587.184.721. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa

TA 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2.414.937.185	2.483.285.708	(2,75)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.779.000	25.034.400	(60,94)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	225.480.000	162.000.000	39,19
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	323.796.676	0	#DIV/0!
Beban Bahan	1.992.155.901	2.913.575.437	(31,63)
Beban Honor Output Kegiatan	670.415.000	1.136.947.500	(41,03)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	583.224.450	441.101.052	32,22
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	170.716.230	0	#DIV/0!
Beban Langganan Listrik	1.015.995.483	1.260.954.013	(19,43)
Beban Langganan Telepon	17.318.976	29.991.903	(42,25)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	396.000.000	420.000.000	(5,71)
Beban Sewa	976.447.700	1.063.386.500	(8,18)
Beban Jasa Profesi	669.455.000	1.129.430.000	(40,73)
Beban Jasa Lainnya	1.028.721.084	7.521.478.208	(86,32)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	174.299.000	0	#DIV/0!
Jumlah	10.668.741.685	18.587.184.721	(42,60)

Dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat beban penanganan pandemic covid-19 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	Jumlah
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	323.796.676
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	170.716.230
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	174.299.000
Jumlah	668.811.906

*Beban
Pemeliharaan
Rp2.393.716.096*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.393.716.096 dan Rp2.473.978.357. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.062.041.055	1.070.381.097	(0,78)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.256.731.941	1.225.836.162	2,52
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	74.943.100	173.632.698	(56,84)
Beban Persediaan suku Cadang	0	4.128.400	(100,00)
Jumlah	2.393.716.096	2.473.978.357	(3,24)

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp4.107.160.492*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.107.160.492 dan Rp6.776.575.153. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.911.988.493	2.791.305.368	-31,50
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	343.530.000	748.960.000	(54,13)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	110.966.000	1.130.881.380	-90,19
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	112.700.000	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.627.975.999	2.042.418.557	-20,29
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	63.009.848	-100,00
Jumlah	4.107.160.492	6.776.575.153	(39,39)

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp5.236.529.559

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.236.529.559 dan Rp6.865.111.723. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.111.206.425	1.507.785.129	(26,30)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.985.998.133	4.019.991.594	(0,85)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-	1.337.335.000	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	5.097.204.558	6.865.111.723	(25,75)
Beban Amortisasi Software	53.807.500	-	
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	85.517.501	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	139.325.001	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.236.529.559	6.865.111.723	(23,72)

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih (Rp0)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp0) dan (Rp0). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	0	(00,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	0	(00,00)
Jumlah	0	0	(00,00)

*Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
(Rp548.501.207)*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	21.030.000	(100,00)
Pendapatan dari Pemindahtangann BMN Lainnya	13.147.786	18.000.000	(26,96)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	564.146.987	0	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	258	3.840.199	(99,99)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	8.178.323	14.744.370	(44,53)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	5.680.587	5.208.549	9,06
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(548.501.207)	52.406.020	(1146,64)

Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional periode 31 Desember sebesar (Rp548.501.207) terdiri dari :

1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp13.147.786 berupa :
 - Lelang 1 Paket barang Inventaris sebesar Rp2.370.009 sesuai Risalah lelang No. 88/28/2020 tanggal 2 April 2020 yang terdiri dari : 13 unit Lemari besi/metal, 1 unit Filling kabinet besi, 3 unit Papan visual/papan nama, 8 unit White board, 1 unit Panel pameran, 1 unit White board elektronik, 18 unit Meja kerja kayu, 41 unit Kursi besi metal, 4 unit Sice, 27 unit Meja rapat, 23 unit Meja komputer, 3 unit Meja telepon, 2 unit Kursi fiber glas/plastik, 8 unit Jam elektronik, 41

unit Mic conference, 2 unit Stabilisator, 5 unit lambing garuda pancasila, 2 unit Dispenser, 3 unit pesawat telepon, 1 unit Facsimile, 1 unit Nasal Speculum Set, 1 unit Refflex Hammer;

- Lelang 1 Paket barang Inventaris sebesar Rp10.777.777 sesuai Risalah lelang No. 90/28/2020 tanggal 3 April 2020 yang terdiri dari : 2.604 buah buku Monografi;

2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp564.146.987 berupa penghapusan sebesar Rp564.146.987 berupa penghapusan 20.603 buah monografi.

3. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya terdapat sebesar Rp258 berupa :

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911) pada kantor BPHN sebesar Rp258 berupa Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu dari potongan SPM;

4. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan yang terbentuk dari penerimaan jurnal SIMAK BMN sebesar Rp8.178.323. Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp407.871.872.538*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp407.871.872.538 dan Rp123.938.732.465.

*Defisit LO
(Rp40.307.524.126)
6)*

E.2 Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp40.307.524.126) dan (Rp51.941.673.027). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan Mendasar
Rp0*

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 dan Rp0.

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp0*

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Atas Reklasifikasi
(Rp131.753.750)*

E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi atas nilai reklasifikasi aset yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan aset yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi kurang atas reklasifikasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp131.753.750) dan Rp0.

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0

E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
(Rp0)

E.3.6 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp.0) dan Rp(0). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2020

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai aset Tetap Non Revaluasi	-
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain
(Rp0)

E.3.7 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Lainnya	-
Jumlah	-

Transaksi Antar
Entitas
Rp39.225.257.913

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp39.225.257.913 dan Rp47.805.858.848. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(17.318.524)
Ditagihkan ke Entitas Lain	38.293.829.111
Transfer Masuk	2.535.762
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	946.211.564
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	39.225.257.913

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar (Rp17.318.524) sedangkan DKEL sebesar Rp38.293.829.111.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Terdapat Transfer masuk sejumlah Rp2.535.762 berupa 1 Buah Tablet PC dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM RI.

Transfer Masuk	Nilai
Aset Tetap Renovasi	-
Peralatan dan Mesin	4.057.218
Penyusutan Transfer Masuk (Peralatan dan mesin)	(1.521.456)
Jumlah	2.535.762

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Terdapat Pengesahan Hibah Langsung bentuk jasa dari USAID (*united States Agency For International Development*) dalam rangka program program *Empowering Access to Justice* (MAJu) yang mendukung pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan jumlah

Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi untuk menyediakan bantuan hukum sebesar Rp946.211.564 sesuai dengan perjanjian hibah 497-AA-030 tanggal 04 Agustus 2016 dan BAST no 226/USAID-INA/BAST-Service/DRG/2020 tanggal 15 Januari 2021 dengan no register 2DS44SFA berupa *Public Consultation for Permenkumham on Paralegal and Legal Aid Services Standards* di Semarang pada tanggal 11-12 Februari 2020 sebesar Rp455.739.472 dan Surabaya pada tanggal 25-26 Februari 2020 sebesar Rp490.472.092. Adapun rincian kegiatan hibah tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Nilai	
		USD	Rp
1	<i>Public Consultation for Permenkumham on Paralegal and Legal Aid Services Standards</i> di Semarang	30.704,00	455.739.472
2	<i>Public Consultation for Permenkumham on Paralegal and Legal Aid Services Standards</i> Di Surabaya	33.004,00	490.472.092
Jumlah		63.708,00	946.211.564,00

Ekuitas Akhir
Rp406.657.852.5
75

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp406.657.852.575 dan Rp407.871.872.538.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Terdapat Jurnal tidak lazim pada Aplikasi E-Rekon dikarenakan adanya penjurnalan terhadap Peralatan dan Mesin yang belum diregister dengan Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp11.541.000 berupa belanja pembelian Thermogun sebanyak 2 unit @Rp5.770.500, hal ini disebabkan karena pada aplikasi SIMAK BMN dicatat sebagai Aset

dengan menggunakan akun 532111 namun pembeliannya menggunakan Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (521131). Pada awal pandemi covid-19 BPHN melakukan belanja untuk percepatan penanganan pandemi covid 19 dengan menggunakan akun belanja barang 521811 dikarenakan belum adanya panduan/pedoman perihal akun khusus penanganan pandemi covid 19 dari kementerian keuangan.

Pada Bulan April 2020 diterbitkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-369/PB/2020 perihal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 yang menerangkan pada angka 4 huruf a bahwa satker yang telah melakukan revisi DIPA dan telah merealisasikan belanja dan sudah terbit SP2D untuk saat itu tidak perlu melakukan revisi, tetapi agar melakukan revisi POK terhadap sisa pagu yang belum terealisasi menggunakan akun khusus Covid-19.

Pada Bulan Juli 2020, diterbitkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S628/PB/2020 sebagai tindak lanjut atas Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-369/PB/2020 perihal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 yang menerangkan pada angka 4 bahwa dalam hal K/L atau satker telah mengalokasikan dana dan/atau telah merealisasikan belanja penanganan pandemi Covid-19 dan sudah terbit SP2D yang tidak menggunakan akun khusus covid-19 agar melakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau ralat dokumen belanja (SPM/SP2D).

Terkait Belanja Thermogun sebesar Rp11.541.000 yang dimaksud di atas, menjadi satu kesatuan (kuitansi/belanja) dengan belanja barang lainnya dalam rangka penanganan pandemi covid-19, maka ralat SPM/SP2D dilakukan ke akun Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid-19 (521131) dan tidak dilakukan ralat ke akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi Covid-19 (532119) dikarenakan akan mengurangi Nilai Total pada SPM/SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Terdapat Utang kepada pihak ketiga terkait Belanja Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp. 85.755.996 yang terdiri dari Tagihan Listrik Kantor BPHN Bulan Desember 2020 Rp31.008.815 dengan no ID 547100717100 dan 547102931079, Tagihan Listrik Bulan Desember 2020 Rp53.454.574 dengan no ID 547100163555 dan Tagihan Telepon Kantor BPHN Bulan Desember 2020 Rp1.292.607 yang sudah dibuatkan jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Pada tanggal 31 Desember 2020 telah dilakukan jurnal atas pengakuan pendapatan diterima dimuka diakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp5.783.858.
4. Pada tanggal 31 Desember 2020 telah dilakukan pencatatan hibah langsung bentuk jasa dari USAID (MAJu) sebesar Rp946.211.564 sesuai dengan perjanjian hibah 497-AA-030 tanggal 04 Agustus 2016 dan BAST no 226/USAID-INA/BAST-Service/DRG/2020 tanggal 15 Januari 2021 dengan no register 2DS44SFA berupa *Public Consultation for Permenkumham on Paralegal and Legal Aid Services Standards* di Semarang pada tanggal 11-12 Februari 2020 sebesar Rp455.739.472 dan Surabaya pada tanggal 25-26 Februari 2020 sebesar Rp490.472.092.
5. Pada Kantor BPHN telah dilakukan Tindak lanjut Atas Temuan Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait Temuan Audit Atas Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020 sesuai surat Tanggapan Hasil Audit atas nama Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.1-PW.04.06-01 tanggal 17 Desember 2020 dan Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi Covid-19 atas kelebihan pembayaran transport pegawai yang melaksanakan tugas *Wok From Office* pada Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional Sebesar Rp500.000 sesuai NTPN B2F1C55DE4P0CUOP tanggal 16 Desember 2020.
6. Pada Kantor BPHN telah dilakukan Tindak Lanjut Atas Temuan Audit BPK pada Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa:
 - Koreksi tambah atas Peralatan dan Mesin dari Aset Tak Berwujud berupa *software* komputer senilai

Rp605.000. *Software* tersebut seharusnya tidak tercatat sendiri sebagai Aset Tak Berwujud karena merupakan *software* sistem operasi yang seharusnya dikapitalisasi pada peralatan mesin yang terpasang *software* terkait.

- Reklasifikasi atas Aset Tak Berwujud lainnya senilai Rp4.159.025.400 menjadi *software* komputer dikarenakan pengelompokan Aset Tak Berwujud tersebut tidak sesuai dengan kodefikasi Aset Tak Berwujud yang seharusnya.

Kode Akun	Nama Akun	Semula	Menjadi	Selisih	Jenis LK
132111	Peralatan dan Mesin	18.928.677.337	18.929.282.337	605.000	Neraca
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(15.510.794.008)	(15.511.399.008)	(605.000)	Neraca
162151	Software	25.905.000	4.184.325.500	4.158.420.500	Neraca
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	4.159.025.500	0	(4.159.025.500)	Neraca
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(25.905.000)	(4.157.421.750)	(4.131.516.750)	Neraca
169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	(4.139.885.500)	0	4.139.885.500	Neraca
391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	131.753.750	131.753.750	LPE
592115	Beban Amortisasi Software	0	53.807.500	53.807.500	LO
592117	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	193.325.000	0	(193.325.000)	LO

Badan Pembinaan Hukum Nasional
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020

No	Aset Tetap	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	AK. Penyusutan	TOT.Akm. Peny.
				Per 31 Desember 2020	Tahun 2020	Periode ini	Per 31 Desember 2020
A	Tanah						
1	Tanah	-	0	-	-		-
	Jumlah		0	-	-		-
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Bantu	18	2.105.854.500	1.451.292.714	240.067.573		1.691.360.287
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	31	4.358.404.450	4.605.841.342	8.307.966	(259.578.000)	4.354.571.308
3	Alat Bengkel Bermesin	5	3.241.700	1.722.765	324.170		2.046.935
4	Alat Bengkel Tak Bermesin	2	10.380.492	9.893.140	487.352		10.380.492
5	Alat Ukur	3	4.507.972	4.235.925	272.047		4.507.972
6	Alat Kantor	915	2.170.585.895	2.147.830.181	98.730.093	(263.977.142)	1.982.583.132
7	Alat Rumah Tangga	1720	3.622.779.125	3.619.732.198	257.480.535	(1.207.274.397)	2.669.938.336
8	Alat Studio	88	835.303.068	746.268.778	25.888.860		772.157.638
9	Alat Komunikasi	147	435.294.420	301.422.340	45.917.484	(20.392.680)	326.947.144
10	Peralatan Pemancar	22	16.649.160	13.831.554	773.916		14.605.470
11	Alat Kedokteran	22	295.855.050	278.615.885	6.066.923		284.682.808
12	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	1	2.195.000	1.865.750	219.500		2.085.250
13	Komputer Unit	328	4.159.995.956	2.308.058.631	371.404.755	2.126.456	2.681.589.842
14	Peralatan Komputer	236	1.010.961.929	694.952.743	73.106.248		768.058.991
15	Peralatan Olahraga	1	22.977.620	-	3.829.603		3.829.603
	Jumlah		19.054.986.337	16.185.563.946	1.132.877.025	(1.749.095.763)	15.569.345.208
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	18	59.305.635.562	9.525.639.781	3.982.259.613		13.507.899.394
2	Tugu/Tanda Batas	1	179.449.000	9.346.300	3.738.520		13.084.820
	Jumlah		59.485.084.562	9.534.986.081	3.985.998.133	-	13.520.984.214
F	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan						
1	Alat Bantu	1	229.812.000	229.812.000	-		229.812.000
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	2	268.973.000	9.395.000	-	259.578.000	268.973.000
3	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	0	-	-	-	-
4	Alat Kantor	26	284.397.942	11.486.000	18.091.800	253.170.142	282.747.942
5	Alat Rumah Tangga	810	1.287.006.078	169.818.500	65.893.181	1.044.250.397	1.279.962.078
6	Alat Studio	0	0	-	-	-	-
7	Alat Komunikasi	9	24.279.200	5.365.000	1.532.520	17.381.680	24.279.200
8	Alat Kedokteran	3	20.000	31.000	-	(11.000)	20.000
9	Alat Khusus Kepolisian	1	195.800	195.800	-	-	195.800
10	Komputer Unit	17	208.650.000	208.650.000	-	-	208.650.000
11	Peralatan Komputer	11	29.801.100	29.801.100	-	-	29.801.100
	Jumlah		2.333.135.120	664.554.400	85.517.501	1.574.369.219	2.324.441.120
	Total		80.873.206.019	26.385.104.427	5.204.392.659	(174.726.544)	31.414.770.542